

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 102 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan pelantikan Pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan kembali Pejabat Pengadaan pada masing-masing unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Ketentuan pada Lampiran I Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGADAAN PADA SATUAN ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

| No | Nama/NIP/Jabatan | Jabatan dalam Penugasan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rita Agustini Sumardi, A.Md NIP. 19780813 201012 2 001 Penelaah Bahan TU | Pejabat Pengadaan pada Inspektorat |
| 2 | Arso Hadi Wardono, S.E. NIP. 19821216 201012 1 001 Kepala Subbagian Pemantauan | Pejabat Pengadaan pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana |
| 3 | Rita Agustini Sumardi, A.Md NIP. 19780813 201012 2 001 Penelaah Bahan TU | Pejabat Pengadaan pada Biro Umum dan Keuangan |
| 4 | Andy Martanto, S.T. NIP. 19760309 201012 1 001 Kepala Subbagian Data dan Informasi | Pejabat Pengadaan pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian |
| 5 | Seno Haryo Wibowo, S.T. NIP. 19800924 201211 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa | Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum |

| No | Nama/NIP/Jabatan | Jabatan dalam Penugasan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Rusli Maryadi, Ak. NIP. 19760728 199601 1 001 Kepala Seksi Kemitraan Infrastruktur | Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus |
| 7 | Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi, S,IP. NIP. 19890428 201402 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa | Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional |
| 8 | Biantri Raynasari, S.T.P. NIP. 19890608 201402 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa | Pejabat Pengadaan pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan |
| 9 | Muhammad Qadr Siddiq Zam, SH. NIP. 19840621 201402 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa | Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog |
| 10 | Donald Sutanto Panjaitan, S.T., M.SE., M.Sc. NIP. 19770515 200502 1 001 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi LPSE | Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik |
| 11 | Joko Heratmo, S.E. NIP. 19901114 201402 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa | Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Profesi |
| 12 | Heldi Yudiyatna, S.T. NIP. 19730713 200501 1 010 Kepala Seksi Materi Pelatihan | Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pelatihan Kompetensi |
| 13 | Nungky Karina Putri, S.Psi . NIP. 19890604 201211 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa | Pejabat Pengadaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi |
| 14 | Lintong Janji Natogu Sinambela, S.E., M.M. NIP. 19820424 201012 1 001 Kepala Seksi Wilayah Sumatera Bagian Utara | Pejabat Pengadaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah I |

| No | Nama/NIP/Jabatan | Jabatan dalam Penugasan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Eben Henry Reagan M S, S.T. NIP. 19870515 201502 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa | Pejabat Pengadaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah II |
| 16 | Linda Mikowati, S.TP NIP. 19870726 201211 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa | Pejabat Pengadaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.